



PUTUSAN

Nomor 271 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **TRI ADHITIA DARMAWAN YUNUS** alias **ADHIT;**

Tempat Lahir : Gorontalo;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/14 Februari 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI ADHITIA DARMAWAN YUNUS alias ADHIT bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan, denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah segera ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange DM 2504 HA, dikembalikan kepada Terdakwa TRI ADHITIA DARMAWAN YUNUS alias ADHIT;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Gto tanggal 28 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ADHITIA DARMAWAN YUNUS alias ADHIT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam oranye DM 2504 HA, dikembalikan kepada Terdakwa TRI ADHITIA DARMAWAN YUNUS alias ADHIT;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2020



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 48/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 4 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Gto., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TRI ADHITIA DARMAWAN YUNUS alias ADHIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Gto untuk selebihnya;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pid/2019/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 9 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 serta

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2020



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, dengan alasan putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan yang berkenaan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap korban, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2020



sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru dalam kasasinya yang dapat mengubah atau membatalkan putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *Judex Facti* telah secara cermat mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidananya, sehingga tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum acara dalam putusan *Judex Facti in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

